

## **Dampak Penerapan Good Governance, Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Penerapan SPIP dan Pemanfaatan SIPKD Terhadap Akuntabilitas Publik Dan Kualitas Laporan Keuangan (Pemerintah Kota Jambi)**

**Etik Winarni<sup>1</sup>, Endah Tri Kurniasih<sup>2</sup>, Ahmad Soleh<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Jambi

Correspondence Autor email: mas.soleh@yahoo.com

**Abstract.** *The main content in quality development is the implementation of good governance. A reflection of good government implementation can be measured from the level of Public Accountability and Its Financial Statements, because both are indicators to see if a region has run good governance or not. In its context as an organization engaged in public service services, the government in its management must conduct transparency and public accountability. Public accountability in accordance with the characteristics of good governance with respect to (1) participation; (2) rule of law; (3) transparency; (4) responsiveness; (5) consensus orientation; (6) equity; (7) effectiveness and efficiency; and (8) strategy vision (Mardiasmo, 2006). This research aims to analyze the impact of good governance, Human Resources Competency (HR), Implementation of Government Accounting Standards (GAS), Implementation of Government Internal Control System (GICS) and Utilization of Regional Financial Management Information System (FMIS) on Public Accountability and Quality of Financial Report. The study used primary data and secondary data. Primary data is obtained from questionnaires distributed directly to respondents using Purposive Sampling techniques. The population in this study was the Regional Device Task Force (RDTF)/Regional Device Organization (RDO) in Jambi city government, with 37 RDTF/RDO and 70 respondents. While the analysis tools used in the study are approaching the Partial Least Squares (PLS) method by negating the assumptions of OLS (Ordinary Least Squares) regression. The results showed that the implementation of good governance, Human Resources Competency (HRC), Application of Government Accounting Standards (GAS) had a positive effect on the quality of Jambi city government financial report. While the implementation of the Government Internal Control System (GICS) and the Utilization of Regional Financial Management Information System (RFMIS) partially did not have a positive effect on the quality of Jambi city government financial report. Furthermore, the implementation of good governance, the Implementation of Government Accounting Standards (GAS), the Implementation of Government Internal Control System (GICS) have a positive and significant effect on Public Accountability. While the utilization of regional financial management information system (RFMIS) has not had a positive effect on public accountability.*

**Keywords:** *Public Accountability, Financial Report*

### **Pendahuluan**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan syarat utama untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Oleh sebab itu sebagai organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik, pemerintahan dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dan laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam perwujudan perubahan informasi untuk akuntansi maupun administrasi publik bagi keterbukaan manajemen pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang dalam pelaksanaannya keduanya tidak dapat dipisahkan karena satu sama lainnya. Laporan keuangan sendiri merupakan suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik atau tidak. Berdasarkan peraturan pemerintah No.8 Tahun 2006, laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.

Permasalahan yang terjadi dalam setiap penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) masih sering terdapat temuan tentang ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang keduanya menjadi indikator penilaian opini dan kualitas LKPD. Disamping faktor lainnya seperti Kualitas SDM, dan pemanfaatan teknologi serta penerapan sistem pengelolaan. Berikut hasil Laporan Keuangan pemerintah Kota Jambi berdasarkan Opini dari BPK.

**Tabel 1.**  
**Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi 2012-2015**

	Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	Opini atas Laporan Keuangan			
		2012	2013	2014	2015
1.	Kerinci	WDP	WDP	WTP	WTP
2.	Merangin	WDP	WDP	WDP	WDP
3.	Sarolangun	WDP	WDP	WDP	WDP
4.	Batang Hari	WTP	WTP	WDP	WTP
5.	Muaro Jambi	WTP	WTP	WDP	WDP
6.	Tanjab Timur	WTP	WTP	WDP	WDP
7.	Tanjab Barat	WDP	WDP	WDP	TMP
8.	Tebo	WDP	WDP	WDP	WTP
9.	Bungo	WDP	WDP	WDP	WDP
<b>10.</b>	<b>Kota Jambi</b>	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>	<b>WDP</b>	<b>TMP</b>
11.	Kota Sungai Penuh	WTP	WDP	WTP	WTP

Sumber: Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jambi, 2016

Bagi pemerintah daerah menjadi satu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dilakukan penelitian yang dapat menggali permasalahan yang menjadi penyebab rendahnya kualitas laporan keuangan sehingga dapat dijadikan dasar untuk perbaikan kualitas akuntabilitas publik dan laporan keuangan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh penerapan good governance, Kompetensi SDM, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) secara parsial terhadap kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Publik Pemerintah Kota Jambi.

### ***Tinjauan Pustaka*** ***Akuntabilitas Publik***

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2006). Sedangkan menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

### ***Kualitas Laporan Keuangan***

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Jadi kualitas laporan keuangan merupakan baik atau tidaknya entitas pelaporan sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah selama suatu periode. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan (Halim, 2012)

### ***Good Governance***

*Good Governance* diartikan sebagai pemerintahan yang baik dengan menyelenggarakan manajemen pembangunan yang bertanggung Jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana Investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran. Sumodiningrat (1999), menyatakan good governance adalah upaya pemerintahan yang amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

### ***Sistem Pengendalian Internal***

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 Sistem pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Sementara menurut Permendagri No.4 Tahun 2008

adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam penciptaan efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian keuangan daerah.

### **Kompetensi Sumberdaya Manusia (SDM)**

Kompetensi merupakan karakteristik individu yang mendasari kinerja atau perilaku ditempat kerja, yang dipengaruhi oleh pengetahuan, kemampuan dan sikap, gaya kerja, kepribadian, nilai sikap, kepercayaan dan gaya kepemimpinan. Sementara menurut Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2011 “Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

### **Standar Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Halim (2012) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang disebutnya sebagai Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi dan kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer. SAP ditetapkan dalam entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah.

### **Sistim Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)**

Sistem pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan (PP No.60 Tahun 2008 tentang SPIP). Sistem pengendalian Internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam penciptaan efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian keuangan daerah (Permendagri No.4 Tahun 2008 tentang pelaksanaan laporan keuangan daerah).

### **Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)**

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Aplikasi Terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulai bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

### **Metode**

Data primer diperoleh dari kuisioner atau wawancara secara langsung kepada responden menggunakan skala likert pada 37 SKPD/OPD Kota Jambi. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2014). Analisa dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan *Partial Least Squares* (PLS) yang merupakan model persamaan struktural yang berbasis komponen atau varian (variance). Adapun langkah-langkah analisis data PLS adalah:

- 1) Merancang Model Pengukuran (*outer model*), tahap ini digunakan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas yang menghubungkan indikator dengan variabel latennya. Indikator dalam penelitian ini adalah reflektif karena indikator variabel laten mempengaruhi indikatornya, sehingga digunakan tiga tahap pengukuran menurut Latan dan Ghozali (2015)
  - a. *Disciminant validity*, evaluasi dilakukan dengan melihat *square root of average variance (AVE)*. Model pengukuran dinilai berdasarkan pengukuran *cross loading* dengan konstruk. Jika kolerasi konstruk dengan setiap indikatornya lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka konstruk laten memprediksi indikatornya lebih baik daripada konstruk lainnya. Jika nilai  $\sqrt{AVE}$  lebih tinggi daripada nilai kolerasi di antara konstruk, maka *discriminant validity* yang baik tercapai. Menurut Latan dan Ghozali (2015), sangat direkomendasikan apabila *AVE* lebih besar dari 0,5.
  - b. *Composite reliability*, apabila nilai *composite reliability*  $pc > 0.6$ , maka dapat dikatakan bahwa nilai kostruk memiliki reliabilitas tinggi atau reliabel.

- c. Croanbach Alpha, Cronbach alpha dikatakan baik apabila  $\alpha > 0.6$
- 2) Merancang Model struktural, model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* ( $R^2$ ) untuk konstruk dependen, *Stone-Geisser Q-square test* untuk *predictive relevance* dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.  $R^2$  dapat digunakan untuk
  - 3) Konstruksi diagram jalur
  - 4) Konversi diagram jalur ke dalam sistem persamaan  
 Dalam tahap ini dibuat persamaan untuk *inner model* dan *outer model*. *Inner model* menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk laten satu dengan konstruk laten lainnya. Persamaan *inner model* adalah sebagai berikut.  

$$\eta_j = \sum_i \gamma_{jb} \xi_b + \zeta_j$$
 Dimana :  $\gamma_{jb}$  = koefisien pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen;  $\zeta_j$  = variabel *inner residual*.  
 Selanjutnya evaluasi outer model digunakan untuk menspesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikatornya. Model persamaan dalam *outer model reflective* yaitu:  

$$x = \lambda x \xi + \delta$$

$$y = \lambda y \eta + \varepsilon$$
 Dimana: x dan y = indikator untuk variabel laten eksogen ( $\xi$ ) dan endogen ( $\eta$ );  $\lambda x$  dan  $\lambda y$  = matriks koefisien;  $\delta$  dan  $\varepsilon$  = matriks *outer model* residu
  - 5) Uji hipotesis (*resampling bootstrapping*)  
 Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95 persen, sehingga tingkat presisi atau batas ketidakakuratan ( $\alpha$ ) sebesar 5 persen, dan menghasilkan nilai t-tabel sebesar 1.96 (Latan dan Ghozali 2015)

Pada penelitian ini variabel yang dianalisa yaitu penerapan *Good governance*, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) sebagai variabel independent. Sedangkan variabel dependent terdiri dari variabel kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Akuntabilitas Publik (AP). Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi selanjutnya dimensi dijabarkan menjadi indikator-indikator yang dapat diukur untuk dijadikan titik tolak untuk membuat pernyataan atau pertanyaan yang perlu dijawab oleh responden. Jawaban setiap instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai lima alternatif jawaban pernyataan positif masing-masing diberi skor, yaitu Sangat Setuju (SS) diberi skor 5, Setuju (S) diberi skor 4, Netral (N) diberi skor 3, Tidak Setuju (TS) diberi skor 2 dan Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1.

## Hasil

Kuesioner yang kembali adalah sebanyak 73 kuesioner dari 74 kuesioner yang disebar, 1 kuesioner tidak kembali karena hilang. Dari kuesioner yang kembali, sebanyak 3 kuesioner yang tidak dapat digunakan karena kuesioner diisi oleh satu orang. Kuesioner yang dapat diolah lebih lanjut berjumlah 70 kuesioner, sehingga tingkat usable respon rate penelitian ini adalah sebesar 95,89 persen. Dari 70 responden sebagian besar responden adalah wanita yaitu sebanyak 44 responden atau 62,86 persen dan sebanyak 26 responden atau sebesar 37,14 persen adalah pria. Dari 70 responden, sebanyak 7 responden atau sebesar 10 persen adalah Sarjana S2, 51 responden atau 73 persen adalah Sarjana S1, 5 responden atau 7 persen adalah Diploma (D3) dan 7 responden atau 10 persen adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Berdasarkan hasil olah data dapat dilihat pada Tabel 1, didapatkan hasil bahwa nilai *AVE* untuk semua konstruk  $>0,50$ . Hal ini berarti syarat validitas konvergen dapat terpenuhi. Selanjutnya diperoleh hasil bahwa nilai *composite reliability* untuk semua konstruk adalah  $>0,70$ . Hal ini berarti semua indikator konstruk adalah *reliable* atau dengan kata lain memenuhi uji reliabilitas. Nilai *Cronbach alpha* yang dihasilkan semua konstruk sangat baik yaitu sebesar  $>0,7$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator konstruk reflektif adalah *reliable* atau memenuhi uji reliabilitas. Namun demikian menurut Latan dan Ghozali (2015), dibandingkan menggunakan *Cronbach alpha* yang dihasilkan oleh *PLS*, disarankan untuk lebih menggunakan acuan pada *composite reliability* atau *Dillion-Goldstein's*.

**Tabel 2.**  
**Rangkuman Hasil Olahan SmartPLS**

Variabel	AVE	Composite Realibility	Croanbachs Alpha	R <sup>2</sup>
Penerapan <i>Good governance</i>	0.631	0.820	0.713	
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0.609	0.822		
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	0.904	0.966	0.947	

Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	0.775	0.912	0.854	
Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0.584	0.873	0.814	
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0.609	0.861	0.785	0.690
Akuntabilitas Publik	0.666	0.888	0.834	0.728

Sumber: data olahan

Tabel 1 dapat dilihat juga bahwa nilai  $R^2$  untuk variabel Kualitas LKPD menunjukkan hasil 0.690, yang berarti bahwa dukungan penerapan Good governance, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mempengaruhi kualitas LKPD sebesar 69 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa bahwa 31 persen faktor atau variabel lain diluar model yang mendukung kualitas LKPD pada SKPD yang ada di Pemerintah Kota Jambi. sedangkan  $R^2$  untuk variabel Akuntabilitas publik sebesar 0.728, yang menunjukkan bahwa penerapan Good governance, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mempengaruhi Akuntabilitas publik sebesar 72.8 persen, sehingga masih ada 27.2 persen variabel atau faktor lain diluar model yang mempengaruhi Akuntabilitas publik.

**Tabel 3**  
**Koefisien Jalur**

Variabel	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T-Stat	p value
Penerapan GG → kualitas LKPD	0.386	0.342	0.178	2.167	0.031
Penerapan GG → AP	0.348	0.364	0.159	2.186	0.029
Kompetensi SDM → kualitas LKPD	0.410	0.434	0.120	3.402	0.001
Penerapan SAP → kualitas LKPD	0.346	0.343	0.089	3.888	0.000
penerapan SAP → AP	0.455	0.441	0.090	5.076	0.000
Pemanfaatan SIPKD → kualitas LKPD	-0.051	-0.038	0.117	0.436	0.663
penerapan SIPKD → AP	-0.085	-0.085	0.112	0.759	0.448
Penerapan SPIP → kualitas LKPD	-0.065	-0.038	0.184	0.352	0.725
penerapan SPIP → AP	0.358	0.349	0.132	2.707	0.007

Sumber: data diolah

Berdasarkan *path coefficients* di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Penerapan good governance, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi
  - a) *Pengaruh Penerapan Good governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*; Nilai *t-statistics* dari pengaruh penerapan good governance berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD adalah sebesar  $2.167 > 1.96$  dengan nilai koefisien penerapan good governance sebesar 0.386, hal tersebut berarti bahwa tingkat penerapan good governance berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD sebesar 38.6 persen.
  - b) *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*; Nilai *t-statistics* dari pengaruh kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD adalah sebesar  $3.402 > 1.96$  dengan nilai koefisien kompetensi SDM sebesar 0.410, hal tersebut berarti bahwa tingkat kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD sebesar 41 persen.
  - c) *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*; Nilai *t-statistics* dari pengaruh penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD adalah sebesar  $3.888 > 1.96$  dengan nilai koefisiennya sebesar 0.346, hal tersebut berarti bahwa tingkat penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD sebesar 34.6 persen.
  - d) *Pengaruh pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*; Nilai *t-statistics* dari pengaruh penerapan SIPKD tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Jambi adalah sebesar  $0.436 < 1.96$  dengan nilai koefisiennya  $-0.051$ , hal tersebut berarti bahwa tingkat pemanfaatan SIPKD tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Jambi sebesar 5.1 persen. Dengan demikian berarti hipotesis pertama tidak didukung oleh temuan hasil penelitian.

- e) *Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*; Nilai *t-statistics* dari pengaruh penerapan SPIP tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Jambi adalah sebesar  $0.352 < 1.96$  dengan nilai koefisiennya  $-0.065$ , hal tersebut berarti bahwa tingkat pemanfaatan SIPKD tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Jambi sebesar 6.5 persen.
2. *Pengaruh Penerapan good governance, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Akuntabilitas Publik*
  - a) *Pengaruh Penerapan Good governance terhadap Akuntabilitas publik*

Nilai *t-statistics* dari pengaruh penerapan good governance berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik adalah sebesar  $2.186 > 1.96$  dengan nilai koefisiennya  $0.348$ , hal tersebut berarti bahwa tingkat penerapan good governance berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik sebesar 34.8 persen. Dengan demikian berarti hipotesis pertama didukung oleh temuan hasil penelitian. Hasil penelitian ini sejalan dengan Prima (2012) dan Azlina (2014), menunjukkan bahwa variabel good governance dan pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja organisasi.
  - b) *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap akuntabilitas publik*

Nilai *t-statistics* dari pengaruh penerapan SAP berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik adalah sebesar  $5.076 > 1.96$  dengan nilai koefisiennya  $0.455$ , hal tersebut berarti bahwa tingkat penerapan SAP berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik sebesar 45.5 persen. Dengan demikian berarti hipotesis pertama didukung oleh temuan hasil penelitian. Hasil penelitian ini sejalan dengan Zeyn (2011) yang menyimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dengan komitmen yang tinggi berpengaruh pada akuntabilitas keuangan. Sedangkan yang tidak sejalan dengan penelitian ini adalah Anjarwati (2012) yang menyimpulkan bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
  - c) *Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap akuntabilitas publik*

Nilai *t-statistics* dari pengaruh penerapan SIPKD tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik adalah sebesar  $0.759 < 1.96$  dengan nilai koefisiennya  $-0.085$ , hal tersebut berarti bahwa tingkat pemanfaatan SIPKD tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik sebesar 8.5 persen. Dengan demikian berarti hipotesis pertama tidak didukung oleh temuan hasil penelitian. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yuliani dan Barkah (2014) yang menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik.
  - d) *pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas publik*

Nilai *t-statistics* dari pengaruh penerapan SPIP berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik adalah sebesar  $2.707 > 1.96$  dengan nilai koefisiennya  $0.358$ , hal tersebut berarti bahwa tingkat penerapan SPIP berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik sebesar 35.8 persen. Dengan demikian berarti hipotesis pertama didukung oleh temuan hasil penelitian. Hasil penelitian ini sejalan dengan Ichlas dkk (2014) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Yuda (2012) menghasilkan simpulan bahwa pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Sedangkan Azlina (2012) membuktikan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Semakin baik dan efektif pengendalian intern yang dilaksanakan, maka kinerja pemerintah juga akan semakin baik.

## **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas publik dan kualitas laporan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan good governance, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi. Sementara Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.
2. Penerapan good governance, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Publik. Sementara Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Publik.

3. Besarnya pengaruh penerapan good governance, kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintahan dapat menjelaskan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 0,690 atau 69 %. Sedangkan 31 % kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dijelaskan oleh faktor lain diluar model.
4. Besarnya pengaruh penerapan good governance, penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintahan mampu menjelaskan akuntabilitas publik sebesar 0,728 atau 72,8 persen, sedangkan 27,2 persen dijelaskan oleh faktor lain diluar model.

#### **Daftar Pustaka**

- Ghozali, I., & Latan. 2015. *Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program Smart PLS-3.0*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, A.S.K., & Muhammad. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Ichlas, M., dkk. 2014. Pengaruh Pemahaman tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap proses Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat dan Implikasinya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*. Universitas Syiah Kuala.
- Ida A. EK.I., & Made A.E.N. 2016. Pengaruh Sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi*, 16(2), 1290-1318.
- Mardiasmo, 2006. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Buku seri membudayakan akuntabilitas publik: Penerbit UPP STIM YKPN.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
- Sumodiningrat, G. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2014. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.